

Sinergi Perguruan Tinggi-Birokrasi-Korporasi (Segitiga Besi Kewirausahaan) untuk Memberdayakan Penduduk Miskin & Pengangguran di Indonesia *Sinergy among Academy-Bureaucracy-Enterpreneur (Iron Entrepreneurship Triangle) on Empowering Poor Citizens and Unemployees in Indonesia*

Supadiyanto

Dosen Luar Biasa (Tamu) Jurusan KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga dan Dosen Tetap Akademi Komunikasi Radya Binatama Yogyakarta (AMIKOM Group), Mahasiswa Kebijakan Media Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang & Kolumnis di Berbagai Surat Kabar Lokal dan Nasional; (Hotline/SMS: 08179447204, e-mail: padiyanto@yahoo.com.Website: <http://www.kompasiana.com/Supadiyanto>).
Diterima 16 Januari 2013, disetujui 8 Maret 2013.

Abstract

The two twisted complex problems of this nation are poverty and unemployment. The indicators are clear. Statistic data still show the national poverty rate still reaches the limit of 12 percent of the total population, while the unemployment rate is still more than 6 percent of the total labor force. Since the Old Order, New Order, until the Reform Order (even Order Post-Reformation later), the problem of unemployment and poverty will remain a sensitive issue and the problems that will never be resolved. This study departs from the author's interest observation in the field of social realities associated with poverty and unemployment. The type of research method is qualitative, deliberately designed to rely on the study of the relevant literature. Researcher find the concept of "iron triangle entrepreneurship", which is expected to be a single solution to address social problems such as poverty and unemployment by integrating the higher education institutios, corporation, and bureaucracy. The difficulty of the ruling governments over the years in providing solutions to the problems of unemployment and poverty is due to the coordination factor. Each element of this nation run on its own, there is no synergy and integration among the various elements of society. Students as high education representation, government as representative of bureaucracy, and entrepreneurs as representative of corporation, are three parties holding the key to success in carrying out the policy of "iron triangle entrepreneurship", as long as they work and move as if it was in his world respectively. In fact, it would be very powerful if the three parties collaborate and work together to give birth to a monumental work that educate the public.

Keywords: High Education- Bureaucracy-Corporate-Unemployment and Poverty

Abstrak

Dua masalah kompleks yang menelung bangsa ini yakni soal kemiskinan dan pengangguran. Indikatornya jelas. Data statistik masih menunjukkan angka kemiskinan nasional masih mencapai limit 12 persen dari total penduduk, sedangkan angka pengangguran masih lebih dari 6 persen dari total angkatan kerja. Sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi (bahkan sampai Pasca Orde Reformasi nanti), masalah pengangguran dan kemiskinan akan tetap menjadi isu sensitif dan problematika yang tidak akan pernah terselesaikan. Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis mengamati realitas sosial di lapangan berhubungan dengan kemiskinan dan pengangguran. Metode penelitian ini berjenis kualitatif, sengaja didesain dengan mengandalkan pada kajian literatur yang relevan. Peneliti menemukan konsep "segitiga besi kewirausahaan", yang diharapkan menjadi salah satu solusi jitu dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dengan jalan mengintegrasikan institusi perguruan tinggi, birokrasi dan korporasi. Sulitnya pemerintah yang berkuasa dari tahun ke tahun dalam memberikan solusi terhadap masalah pengangguran dan kemiskinan, lebih dikarenakan faktor koordinasi. Masing-masing elemen bangsa masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada sinergi dan pengintegrasian di antara berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa sebagai representasi kampus, pemerintah mewakili birokrasi dan pengusaha sebagai ikonik dari korporasi, adalah tiga pihak yang memegang kunci kesuksesan dalam menjalankan kebijakan "segitiga besi kewirausahaan" ini. Selama ini mereka bekerja dan beraktivitas seolah-olah berada pada dunianya masing-masing. Padahal, akan sangat ampuh jika tiga pihak tersebut berkolaborasi dan bersinergi sehingga melahirkan karya-karya monumental yang semakin mencerdaskan publik.

Kata kunci: Perguruan Tinggi-Birokrasi-Korporasi-Pengangguran dan Kemiskinan

A. Penduduk Indonesia dan Kemiskinan

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 238 juta jiwa, realitas sosial menunjukkan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia kini masih tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2013, bahwa hingga September 2012 tercatat ada sebanyak 28,59 juta penduduk miskin (11,66 persen) di Indonesia. Sedangkan pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin masih berjumlah 29,13 juta orang (11,96 persen) dan jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,24 juta yang orang menganggur (6,14 persen) per Agustus 2012. Terjadi tren penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2011. Sebab jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Sedangkan kuantitas pengangguran pada Agustus 2011 tercatat ada 7,7 juta orang menganggur (6,56 persen).

Data di atas bisa ditafsirkan dengan dua macam interpretasi. *Pertama*, model interpretasi "negatif". Bahwa dengan jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih cukup tinggi di atas, mengakibatkan lambannya percepatan pembangunan nasional dan munculnya permasalahan sosial dan kemasyarakatan, sebagai indikasi ketidak-efektivitasan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan duet kepemimpinan SBY-Boediono. Program pembangunan nasional bisa berjalan sukses ketika jumlah penduduk miskin, menurut pandangan penulis, maksimal hanya berada di angka 5 persen dari total jumlah penduduknya. Serta jumlah pengangguran nasional tinggal menyisakan maksimal 2,5 persen dari total penduduk usia produktif atau angkatan kerja. Jumlah pengangguran nasional dan angka kemiskinan yang masih tinggi di atas semakin menjauhkan impian seluruh penduduk negeri dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, cerdas dan sejahtera.

Kedua, model interpretasi "positif". Bahwasannya, dengan adanya data jumlah penduduk miskin setinggi 29,13 juta orang, berarti

angka itu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berekonomi menengah ke atas. Bukankah masih ada sebanyak 208,87 juta orang Indonesia yang hidup dalam perekonomian kelas menengah ke atas. Adanya data jumlah pengangguran yang sekarang mencapai angka 7,24 juta orang, berarti angka tersebut juga terbilang kecil jika disandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak menganggur (bekerja) atau jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 112,8 juta orang. Mereka yang berada di kelompok penguasa atau pejabat negara, model interpretasi yang kedua yang cenderung digunakan. Sebaliknya, jika mereka berada di luar ranah kekuasaan, cara pandang atau interpretasi yang pertama yang coba digembar-gemborkan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran nasional yang kemudian menjadi beban bagi bangsa ini, sejatinya bukan hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah yang berkuasa. Kesadaran setiap elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pengamat, pebisnis (pelaku dunia usaha), penegak hukum, masyarakat awam dan seluruh komponen bangsa ini menjadi kunci dalam meminimalisir jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran nasional. Hanya sayangnya, ketidakkompakan antar *stakeholders* dalam membongkar pemicu-pemicu lahirnya orang miskin baru dan pengangguran baru, menjadi penyebab telak yang mengakibatkan mengapa dari masa ke masa, dari rezim demi rezim, tetap saja jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia masih tetap saja tergolong tinggi. Di samping itu, soal pengangguran di Indonesia sering tidak diperlakukan sebagai masalah makroekonomi oleh pemerintah maupun para pengkritiknya. Padahal menurut berbagai sumber referensi, pengangguran adalah salah satu soal terpenting makroekonomi. Pengangguran sebagai indikator makroekonomi bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa selama kurun waktu tertentu (*Rizky, Awali dan Majidi, Nasyith, 2008*).

Dengan cara membangun jembatan akademik antara dunia perguruan tinggi (kampus), birokrasi dan korporasi, dinilai menjadi solusi jitu (ampuh/sakti) dalam meminimalisir jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran nasional. Sehingga diharapkan, target dalam jangka menengah (10 tahun mendatang atau tahun 2022), jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa dikepras sehingga maksimal tinggal 5 persen saja (dari total penduduk Indonesia) dan juga jumlah pengangguran nasional bisa ditekan hingga angka maksimal 2,5 persen (dari total angkatan kerja atau usia produktif). Dengan begitu, terbentuknya jaringan “segitiga besi wirausaha” yang melibatkan tiga komponen yakni kampus-birokrasi-korporasi, sebagai satu-satunya solusi termanjur di antara alternatif-alternatif solusi lainnya.

Merujuk pemaparan pada Bagian Pendahuluan (Prolog) di atas, ada dua model pertanyaan yang menarik untuk dijadikan rumusan masalah penelitian ini. Pertanyaan *pertama* yang relevan dimunculkan yaitu, bagaimanakah peranan ideal perguruan tinggi/kampus (baca: mahasiswa, sarjana dan dosen) dalam menyikapi tingginya jumlah angka pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia? Apakah mereka akan cukup mengkritisi kenyataan tersebut dengan melontarkan berbagai alternatif solusi melalui berbagai media cetak/elektronik, bahkan melalui jurnal ilmiah dan forum ilmiah seperti seminar, diskusi, *workshop*? Ataukah mereka harus terjun langsung ke lapangan bersinergi dengan pemerintah dan menggandeng pihak korporasi, lantas menyatu dengan kehidupan masyarakat miskin dan para pengangguran; kemudian memberdayakan potensi yang mereka miliki secara optimal?

Pertanyaan *kedua*, bagaimanakah mengoptimalkan potensi *insting* bisnis, intelektual dan spiritual yang dimiliki para akademisi (dosen, mahasiswa dan sarjana), sebab selama ini ditemukan kenyataan bahwa jutaan akademisi (kampus) tersebut ternyata berstatus pengangguran, dan potensi dunia birokrasi di Indonesia yang selama ini dinilai koruptif, serta potensi dunia korporasi yang dipandang tidak

banyak melahirkan pengusaha nasional yang andal?

B. Metode Rancang Bangun Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni mengandalkan pada kajian pustaka. Peneliti berupaya menggali berbagai sumber data dokumentasi, kemudian melakukan penginterpretasian meliputi penganalisan, pengontemplasian, pengomparasian, mengkonklusikan masing-masing bahan kajian kepustakaan. Sumber referensi sebanyak sembilan buku, jurnal dan *prosi-ding*. Teknik pengumpulan data mengambil dari lima sumber referensi utama di antaranya merupakan naskah karya ilmiah yang penulis susun sendiri, yang termuat di berbagai *prosi-ding* dan jurnal ilmiah (berkaliber Internasional dan nasional), sebagai sandaran dalam penulisan ini, untuk mengemukakan sisi orisinalitas ide atau gagasan. Meskipun risikonya, sisi subjektivitas penulis lebih menonjol, tetapi aspek objektivitas data juga tidak terkesampingkan sebab ada data pembandingnya. Dengan metode kualitatif justru memberi keleluasaan, keluwesan dan kelonggaran bahkan otoritas penuh (mutlak, absolut) kepada peneliti, sebagai instrumen penelitian itu sendiri, melalui proses penginterpretasian data berdasarkan pengalaman empirik, emik dan etikanya. Empat sumber referensi kajian utama lainnya (sebagai pembanding) adalah makalah yang ditulis oleh *Kanjeng Sinuwun* Sri Sultan Hamengku Buwono X, Awali Rizky-Nasyith Majidi, Sri Suwitri dan Hempri Suyatna, yang dipilih secara purposif sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan referensi pokok lainnya, sehingga semakin mengokohkan wacana, gagasan, pemikiran dan solusi yang dilontarkan untuk mengatasi berbagai persoalan klasik menyangkut isu kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Teknik analisis data secara deskriptif-kualitatif.

C. Segitiga Besi Kewirausahaan (*Triangles Iron Entrepreneurship*)

Dalam Bagian Pembahasan ini, akan dibahas dua permasalahan pokok yang muncul pada bagian di atas (Perumusan Masalah).

Model pembahasan dilakukan dengan mengacu pada berbagai informasi akurat yang terdapat pada berbagai sumber literatur (studi pustaka). *Pertama*, akan dibahas mengenai peranan ideal perguruan tinggi/kampus (baca: mahasiswa, sarjana dan dosen) dalam menyikapi tingginya jumlah angka pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia. *Kedua*, akan dibahas mengenai strategi pengoptimalisasian potensi *insting* bisnis, intelektual dan spiritual yang dimiliki para akademisi (dosen, mahasiswa dan sarjana), sehingga dapat melahirkan para intelektual yang andal, birokrat yang mumpuni dan jujur serta pengusaha nasional yang andal; sehingga mampu secara efektif dalam memberdayakan penduduk miskin dan pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. Di samping itu juga disajikan mengenai pengimplementasian program “segitiga besi kewirausahaan” di mana menyinergisasikan antara tiga institusi perguruan tinggi, birokrasi dan korporasi.

1. Peran Ideal PT dan konsep “Segitiga Besi Kewirausahaan”

Apabila diamati, selama ini memang belum terjadi pengintegrasian konsep “segitiga besi kewirausahaan” baik dalam pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Konsep “segitiga besi kewirausahaan” dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai terkoneksiannya secara holistik antara dunia pendidikan tinggi, birokrasi dan korporasi. Pendidikan tinggi adalah simbol kecerdasan. Birokrasi adalah representasi penguasa negara (pemerintah) dan korporasi sebagai ikon bisnis atau penggerak roda perekonomian (Supadiyanto, 2012).

Di Amerika Serikat dan Inggris, atau di negara-negara maju, sudah sejak lama selalu diperkuat kebijakan “segitiga besi” yang terdiri atas pendidikan-transportasi-industri,

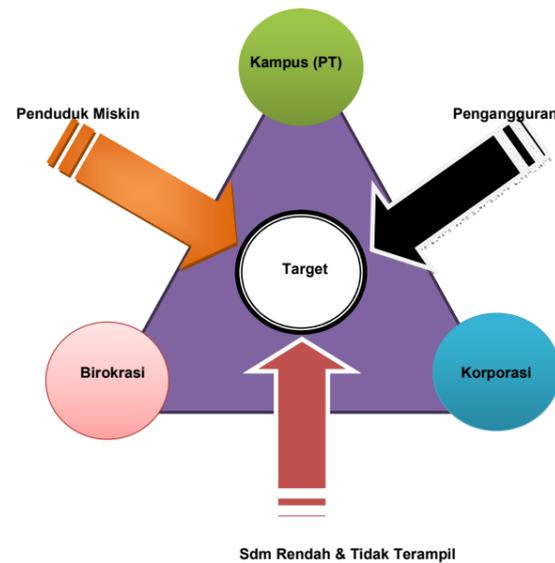
sebab eksekusinya selalu berhubungan dengan kehidupan perekonomian. Masing - masing *stakeholders* di negara-negara maju saling terkoneksi, saling bekerjasama dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan untuk jangka pendek, menengah dan panjang (Suwitri, Sri, 2011).

Realitas sosial yang terjadi di Indonesia, pelaksanaan berbagai kebijaksanaan yang menyangkut hajat hidup jutaan orang justru berkebalikan dengan teori “segitiga besi”, antara unsur-unsur pengambil keputusan dan kebijakan kerap kali berseberangan kepentingan. Akibatnya, berbagai program yang dijalankan baik pemerintah maupun pihak swasta berjalan tanpa koordinasi, sehingga menjadi kontra-produktif dan hasilnya tidak efektif.

Berhubungan dengan realitas angka kemiskinan dan pengangguran nasional yang cukup tinggi (data BPS menunjukkan angka sebesar 28,59 juta jiwa dan 7,24 juta orang), gagasan terpokok dalam penelitian ini yang harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa yakni membangun jembatan akademik antara dunia kampus-birokrasi-korporasi. Dalam konteks ini diistilahkan sebagai “segitiga besi kewirausahaan”. Seluruh potensi bangsa dikerahkan untuk kekokohan dalam hal pendidikan (kecerdasan dan keterampilan hidup), kebijakan bernegara dan tata kelola perekonomian (Supadiyanto, 2012).

Dalam konsep “segitiga besi kewirausahaan”, pelajar (SD-SMA/K/MA) ditempatkan sebagai generasi emas yang akan dikader menjadi mahasiswa produktif atau pengusaha. Pada jangka panjang, mahasiswa tersebut dipersiapkan untuk mengisi pos-pos strategis yang ada dalam struktural kampus, birokrasi dan korporasi. Secara sinergis, setiap mahasiswa digembleng secara interaktif dan persuasif dengan mendapatkan tiga basis keahlian dalam bidang perkampusan, perbirokrasian dan perkorporasian.

Visualisasi Konsep “Segitiga Besi Kewirausahaan”



Dari visualisasi konsep “segitiga besi kewirausahaan” di atas dapat diinterpretasikan bahwa sinergisitas antara tiga *stakeholders* (perguruan tinggi - birokrasi - korporasi) dalam memberdayakan penduduk miskin, pengangguran dan penduduk berpendidikan rendah dan tidak terampil; menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran nasional. Dari konsep pemikiran di atas, tentu saja masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh dengan menciptakan konsep elaboratif lainnya yang lebih komprehensif, sehingga memungkinkan pihak luar negeri, misalkan perusahaan multinasional juga dapat berperan serta dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia. Konsep “segitiga besi kewirausahaan” idealnya juga dapat dikembangkan di berbagai negara, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia.

Melalui konsep segitiga besi kewirausahaan, diharapkan akan melahirkan pendidikan nasional yang berbasis kampus, berbasis korporasi dan berbasis birokrasi. Pendidikan berbasis kampus akan mendidik setiap mahasiswa menjadi kaum intelektual yang progresif dan revolusioner, aplikatif terhadap setiap teknologi baru, memiliki keahlian

sebagaimana yang dimiliki dosen mereka. Pendidikan berbasis birokrasi, akan mendidik setiap mahasiswa memiliki pengetahuan sekaligus keahlian praktis dalam bidang hukum, tata kelola pemerintahan dan segala hal yang bersinggungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan berbasis korporasi, akan menempa mental para mahasiswa menjadi pelaku bisnis atau pengusaha. Konsep “segitiga besi kewirausahaan” tak bisa berjalan efektif dan efisien jika tidak ada kerjasama yang baik di antara berbagai elemen bangsa (Supadiyanto, 2012).

2. Optimalisasi Potensi Pelajar dan Mahasiswa

Berdasarkan data Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada sebanyak 3.070 perguruan tinggi (2.987 PTS dan 83 PTN) di Indonesia. Mereka terdiri atas 465 universitas, 55 institut, 1.345 sekolah tinggi dan 1.037 akademi serta 168 politeknik. Indonesia memiliki 4.657.483 mahasiswa, 165 ribu dosen (bergelar magister sebanyak 80 ribu orang, 15 ribu orang bertitel doktor, sisanya bergelar sarjana), yang semuanya bisa dijadikan potensi kebangkitan bangsa. Namun menjadi bumerang ketika dunia perguruan tinggi tidak mampu menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas tinggi. Nahasnya, belum ada data yang sah mengenai berapa jumlah total lulusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, atau berapa banyak ahlimadya, sarjana, magister, doktor dan profesor yang dimiliki Indonesia. Sangat memprihatinkan.

Ternyata jumlah sarjana dan ahlimadya yang menganggur secara nasional hingga kini mencapai sebesar 790 ribu orang. Terdiri atas 250 ribu lulusan Diploma I hingga Diploma III dan 540 ribu lulusan Sarjana. Secara sederhana, justru sebagian ahlimadya dan sarjana yang dimiliki justru menambah panjang daftar pengangguran nasional. Padahal idealnya, mereka harus mampu mengatasi masalah pengangguran yang membelit kehidupan bangsa. Apalagi jumlah utang luar negeri Indonesia yang kini hampir mencapai Rp 2.400 triliun, tentunya menjadi

beban permasalahan yang semakin berat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, jumlah utang luar negeri Indonesia pada Maret 2013 sebesar USD 250,54 miliar. Atau setara dengan Rp 2.380,13 triliun (kurs rupiah Rp 9.500 per 1 USD). Terdiri dari utang pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 125,48 miliar (50,08%) atau setara Rp 1.192,06 triliun dan utang swasta sebesar USD 125,06 miliar (49,92%) atau setara Rp 1.188,07 triliun (*Indonesia Financial Today edisi 5 April 2013*).

Kalkulasinya, dengan jumlah utang luar negeri Indonesia yang kini hampir mencapai Rp 2.400 triliun, dan dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 28,59 juta jiwa dan 7,24 juta pengangguran, tentunya menambah stok problematika kebangsaan menjadi kian kompleks lagi. Untuk menjadi sebuah negara maju, Indonesia harus memiliki minimal 4,76 juta pengusaha atau 2 persen dari jumlah penduduk. Angka 2 persen, adalah batas minimal. Idealnya, agar perekonomian Indonesia bisa sepadan dengan negara-negara maju, Indonesia harus memiliki sebanyak 23,8 juta pengusaha atau 10 persen dari total penduduk (Supadiyanto, 2012).

Namun hingga awal April 2013 ini, jumlah pengusaha nasional baru berjumlah 3,71 juta orang (1,56 persen) dari 238 juta penduduk Indonesia. Kalau mau dipersentasikan, kuantitas pengusaha (*entrepreneur*) yang dimiliki Indonesia sekarang baru mencapai 1,56 persen dari jumlah penduduk. Pengusaha Singapura mencapai 7,2 persen, Malaysia 2,1 persen, Thailand 4,1 persen, Korea Selatan 4 persen, China dan Jepang mencapai 10 persen. Negara yang tertinggi yang memiliki pengusaha adalah Amerika Serikat, sebesar 11,5-12 persen. Jika ingin mencapai standar minimum 2 persen saja, Indonesia masih butuh lagi minimal 1,05 juta pengusaha baru. Target minimalnya, Indonesia memiliki 4,76 juta pengusaha (2 persen).

Rendahnya jumlah pengusaha nasional yang dimiliki Indonesia jelas memperlambat percepatan pembangunan nasional. Kecenderungan yang terjadi, banyak angkatan kerja yang lebih gemar bekerja menjadi karyawan,

pegawai negeri sipil, guru dan buruh pabrik. Ironisnya, sangat sedikit pelajar dan mahasiswa yang memiliki cita-cita (berambisi) menjadi pengusaha.

Menurut data Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (2013), di Indonesia saat ini memiliki sekitar 10 ribu SMA dan 9.840 SMK dengan total siswa 4,5 juta. Jumlah SMK terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan peminat. Pada tahun 2011, jumlah peminat SMK mencapai 1,93 juta, sedangkan peminat SMA jauh lebih kecil yakni sebesar 1,4 juta. Menurut data yang dimiliki Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebanyak 5.240 SMA kini sedang memproses diri menuju sekolah standar nasional, dan sekitar dua ribu SMA masuk kategori rintisan sekolah standar nasional, dan 300 SMA masuk kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional (RSBI) yang tersebar di 212 kabupaten/kota, sementara sekitar dua ribu SMA dalam keadaan “mati suri”.

Salah satu parameter untuk menentukan bagus atau buruknya kualitas lembaga pendidikan, misalkan di tingkat perguruan tinggi bisa dilihat dari kualitas Sarjana (Ahlimadya) atau lulusan kampus tersebut. Apakah seluruh lulusan kampus tersebut terserap oleh pasar dan tidak menganggur? Atau siapa sajakah orang-orang ternama (tokoh masyarakat, politikus, pengusaha) yang pernah menjadi alumnus kampus bersangkutan. Logikanya semakin berkualitas sebuah kampus, akan meluluskan sarjana atau ahlimadya yang pasti dibutuhkan negara. Betapa ampuhnya potensi pelajar dan mahasiswa ketika mereka dapat diberdayakan menjadi pengusaha. Menjadi pelajar pengusaha dan mahasiswa pengusaha, dan setelah lulus dari bangku perguruan tinggi menjadi pengusaha sejati, yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan bisnis dan kecerdasan spiritual dan emosional.

Pada dasarnya setiap anak muda Indonesia adalah generasi emas bangsa. Mereka yang akan menjadi calon pemimpin bangsa di berbagai tingkatan. Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus, yang memiliki karakter khusus sebagai manusia intelektual harus mampu menunjukkan kepemimpinan mereka dalam berbagai lapisan masyarakat.

Anehnya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia masih menjadi manusia yang belum memiliki kemandirian hidup. Mereka masih tergolong manusia-manusia Indonesia yang berstatus pengangguran, yang menggantungkan kehidupan dari uluran tangan orang tua dan keluarganya. Padahal usia mereka sudah tergolong usia produktif yang mestinya sudah bisa menghasilkan pendapatan pribadi dan bisa hidup mandiri.

Permasalahan tersebut hanya bisa ditanggulangi dengan baik melalui program nasional pembentukan mahasiswa pengusaha. Mahasiswa pengusaha dikondisikan secara sistematis agar memiliki unit usaha bisnis tertentu, yang bisa menghasilkan pendapatan (uang). Atau mereka distimuli bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus, yakni kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah, pada bidang usaha tertentu sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki setiap mahasiswa.

Dengan mengoptimalkan program mahasiswa pengusaha, dengan jumlah mahasiswa seluruh Indonesia yang lebih dari 4,65 juta jiwa, dirasa optimistik problematika sosial dan ekonomi yang menelung bangsa ini dapat diatasi. Tinggal kemudian dilihat bersama, seberapa besar komitmen dan kinerja generasi muda seluruh Indonesia dalam mewujudkan misi tersebut (Supadiyanto, 2012).

3. Implementasi Program “Segitiga Besi Kewirausahaan” (PT-Birokrasi-Korporasi)

Pengimplementasian kebijakan “segitiga besi kewirausahaan” sejatinya tidak hanya difokuskan di lingkungan kampus semata, tetapi sekaligus melibatkan dua institusi lainnya, yakni birokrasi dan korporasi. Pelaksananya, harus dilakukan secara serentak di berbagai kawasan perkotaan dan pedesaan, bahkan akan lebih efektif jika bisa diimplementasikan hingga tingkat satuan terkecil dari sebuah bangsa, yakni individu dan keluarga. Namun untuk mencapai ke tingkat tersebut, tentunya bukan hal yang mudah. Langkah yang lebih sederhana dan logis adalah dengan menerapkan konsep “segitiga

besi kewirausahaan” hingga tingkat kabupaten dan kota.

Indonesia yang sudah terkonstruksi atas 399 kabupaten dan 98 kota, sejatinya menjadi struktur yang dapat diandalkan dalam menggerakkan program “segitiga besi kewirausahaan”. Konsep tersebut bisa langsung diimplementasikan secara serentak di 497 kabupaten dan kota se-Indonesia. Kepala daerah, petinggi kampus dan pengusaha daerah atau nasional yang berkiprah di kabupaten dan kota di seluruh pelosok nusantara wajib berdiskusi bersama dalam satu forum, kemudian mengimplementasikan segala kebijakan “segitiga besi kewirausahaan” sehingga sangat berguna dalam memberdayakan potensi daerah.

Potensi daerah adalah aset utama yang mendukung terselenggaranya aset nasional, sehingga dengan kokohnya basis perguruan tinggi, birokrasi, dan korporasi di setiap kabupaten dan kota di Indonesia, secara otomatis percepatan pembangunan nasional dapat tercapai dengan mudah. Berbagai program yang bisa digulirkan dalam kebijakan “segitiga besi kewirausahaan” antara lain pemberdayaan mahasiswa pengusaha produktif, pemberdayaan keluarga miskin berwirausaha, pemberdayaan pengangguran menjadi pengusaha industri kreatif, pendidikan berbasis kampus, birokrasi dan korporasi yang dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

Secara kalkulatif, duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 99 triliun sepanjang tahun 2012 untuk memberdayakan penduduk miskin. Dana tersebut berasal dari gabungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menaungi 141 perusahaan milik negara berbentuk PT dan Perum), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pihak swasta. Menurut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras, tahun 2013 pemerintah mengalokasikan dana pengentasan kemiskinan sebesar 100 triliun yang tersebar di 27 Kementerian dan Lembaga (Investor Daily edisi 25 Maret 2013).

Namun mengapa penggelontoran dana sebesar 100 triliun untuk mengentaskan penduduk miskin tidak banyak “berdampak positif” terhadap jumlah penduduk miskin di tanah air? Langkah-langkah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya segera dilakukan proses evaluasi kritis. Sebab secara statistik, besarnya anggaran negara untuk mengentaskan kemiskinan tersebut masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya anggaran negara yang dihabiskan untuk membiayai Pemilu 2009 yang menghabiskan 479 triliun, dan besarnya APBN dan APBD yang digunakan untuk membiayai pesta demokrasi di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, kota) di Indonesia untuk mengelat pemilihan kepada daerah langsung (Pilkada). Apabila dihitung, tentu nominalnya bisa melebihi jumlah anggaran negara untuk memberdayakan dan mengentaskan penduduk miskin dan yang masih menganggur. Belum ada data pasti yang bisa dirujuk mengenai jumlah anggaran negara yang dihabiskan untuk membiayai seluruh Pilkada di 530 daerah, meliputi 33 propinsi, 399 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Kendati demikian, ongkosnya mencapai triliunan rupiah. Jadi dari segi kebijakan bernegara saja, ada kesalahan orientasi pengaturan dalam pengelolaan keuangan bernegara. Belum lagi kalau dipertautkan dengan maraknya praktik korupsi di berbagai birokrasi; tentu saja menambah besar raibnya anggaran negara yang mestinya dipergunakan untuk memajukan dan memakmurkan kehidupan masyarakat. Dengan adanya program “segitiga besi kewirausahaan”, diharapkan mampu memberikan solusi jitu bagi upaya pemerintah mengentaskan penduduk miskin dan pengangguran.

Secara kultural, bangsa ini memiliki pondasi mental dan moralitas yang memadai. Indonesia yang terkonstruksi oleh berbagai etnis, suku, bahasa, latar belakang budaya yang beraneka rupa dan menempati kawasan pulau yang sangat luas dan terpisah-pisah; menjadi kekuatan dan peluang bagi kemajuan bangsa. Namun pada sisi lain, sekaligus menimbulkan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan dan eksistensi NKRI.

Menurut Sri Sultan HB X, tantangan budaya yang dihadapi bangsa Indonesia teramat besar sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan global. Kemampuan tersebut hanya akan terbentuk apabila *local wisdom* dan *local genius* dalam segenap tahap kehidupan, orientasi, persepsi, sikap dan cara hidup; ditumbuhkan dari dalam dan dimanifestasikan dalam tindakan (HB X, Sri Sultan. 2011).

Di era globalisasi, hukum yang dianut adalah perdagangan bebas. Semua pihak berkompetisi secara bebas untuk menghegemoni atau menjadi pihak yang terhegemoni oleh kekuatan pasar yang terbuka lebar, tanpa peduli pada batas-batas negara. Rosabeth Moss Kanter (1995) mengungkapkan, pemain kunci di pasar global yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan *intangible asset 3 C* yang meliputi: *concept, competence, connection* (Tamba, 2004), yang terjadi sekarang acap kali *Asset Intangible 3 C* seperti yang diungkapkan oleh Kanter di atas tidak ada yang dimiliki oleh pelaku bisnis, seperti korporasi kelas menengah ke bawah. Hal ini mengakibatkan tidak akan ada keadilan jika dalam domain pasar bebas di era globalisasi, pemilik *intangible asset 3C* diadu bersaing dengan industri menengah dan kecil yang hanya bermodalkan semangat hidup (Suyatno, Hemptri. 2010).

Namun pada sisi lain, tersedianya perangkat teknologi berbasis internet, juga dapat dijadikan program pendukung konsep “segitiga besi kewirausahaan” di atas. Logikanya, teknologi internet bisa diaplikasikan dalam dunia bisnis, komunikasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, pertahanan dan keamanan. Globalisasi yang disimbolkan dengan aturan perdagangan dan komunikasi bebas lintas negara; mengakibatkan pertukaran dan perkembangan informasi semakin cepat, jelas berujung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjinakkan arus globalisasi sendiri, sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan informasi dengan baik.

Data menunjukkan jumlah pengguna internet mengalami perkembangan dahsyat hingga September 2012. Menurut data Antara

News, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 48 juta orang. Data Saling Silang mencatat ada 84,748 juta pengguna internet. *Internet World Stats* menorehkan, jumlah pengguna internet di Nusantara mencapai 39,6 juta orang. Dalam tiga tahun mendatang (2015) terjadi lonjakan pengguna internet di Indonesia hingga mencapai 100 juta pengguna. Menengok data penelitian *Yahoo! Inc.* (2011) tentang "Perilaku Penggunaan Internet di Indonesia" yang dimuat *thejakartapost.com*, aktivitas penggunaan internet di Indonesia terbanyak digunakan untuk *social networking* (89 persen), portal (72 persen), membaca berita di *website* (61 persen). Penelitian dilakukan di 13 kota besar selama tiga bulan dengan 4.482 koresponden, menemukan fakta internet menjadi media terbesar kedua setelah televisi, mengalahkan koran dan radio. Fakta lain, pengguna internet mayoritas anak muda (15–24 tahun).

Teknologi internet menghilangkan tapal batas geografis, perbedaan waktu; bahkan menembus hambatan bahasa dan kultural, berimplikasi multikompleks yakni membawa berbagai perubahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, humaniora, kemanusiaan, lingkungan hingga relasi Internasional. Teknologi dapat dikatakan sebagai mahkotanya ilmu (pengetahuan). Ilmu pengetahuan merupakan pengonstruksi peradaban, sedang peradaban manusia mustahil ada tanpa teknologi.

Dengan dukungan teknologi internet dan penyempurnanya, konsep "segitiga besi kewirausahaan" bisa diaplikasikan secara riil, sehingga manfaatnya akan segera dirasakan bersama. Dalam konteks tersebut, pengusaha, pemegang kebijakan di tingkat daerah dan pusat (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan mahasiswa, dosen, sarjana dan ahlimadya bahkan magister, doktor dan profesor (akademisi) menjadi ujung tombak dalam menyukseskan rencana kebijakan tersebut. Sebab mereka adalah pemikir bangsa, sekaligus benteng pertahanan "intelektual terakhir" dalam mempertahankan kelangsungan dan kemajuan masa depan bangsa.

D. Rangkuman

1. Kesimpulan

Pertama, "segitiga besi kewirausahaan" merupakan konsep pemikiran yang berusaha menjembatani terjadinya pengintegrasian antara dunia perguruan tinggi, birokrasi dan korporasi, guna menjawab problematika kompleks berhubungan dengan masalah kemiskinan dan pengangguran yang hingga kini masih membelit bangsa. Konsep tersebut sesungguhnya mengadopsi kebijakan "segitiga besi" dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam konsep "segitiga besi kewirausahaan", peranan ideal perguruan tinggi (baca: mahasiswa, sarjana dan dosen) dalam memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia sangat strategis dan penting. Jutaan mahasiswa di Indonesia harus didorong tidak sekadar bertugas menuntut ilmu, tetapi harus dituntut memiliki karya nyata untuk menjadi mahasiswa pengusaha. Begitu juga dengan posisi pemegang kebijakan di pusat dan daerah (legislatif, yudikatif, eksekutif), serta pengusaha nasional dan daerah (korporasi), memegang peran penting dalam merealisasikan sinergi dalam program "segitiga besi kewirausahaan". Tidak ketinggalan seluruh elemen bangsa berkontribusi vital dalam mewujudkan masyarakat madani. Mustahil masyarakat madani terwujud jika banyak penduduk menganggur dan hidup miskin.

Kedua, betapa ampuhnya dapat memberdayakan potensi jutaan pelajar dan mahasiswa menjadi pengusaha sejati, yang memiliki kecerdasan intelektual, bisnis dan spiritual-emosional. Sebab, pada dasarnya setiap anak muda adalah generasi emas bangsa. Mereka yang akan menjadi calon pemimpin bangsa di berbagai tingkatan. Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus harus mampu menunjukkan kepemimpinan mereka dalam berbagai lapisan masyarakat. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan hanya bisa ditangkal dengan program jangka panjang, menjadikan program "segitiga besi kewirausahaan" sebagai solusi, dengan menitikberatkan sinergisitas antara kampus, birokrasi dan korporasi. Dengan me-

ngoptimalisasikan program mahasiswa pengusaha, jumlah mahasiswa seluruh Indonesia yang lebih dari 4,65 juta jiwa, dirasa optimistik problematika sosial dan ekonomi yang menelung bangsa dapat di atasi. Secara kultural, bangsa Indonesia memiliki fondasi mental dan moralitas yang memadai. Indonesia yang terkonstruksi oleh berbagai etnis, suku, bahasa, latar belakang budaya yang beraneka rupa dan menempati kawasan pulau yang sangat luas dan terpisah-pisah menjadi kekuatan dan peluang bagi kemajuan bangsa.

2. Saran

Gagasan tentang segitiga besi kewirausahaan ini sudah pernah penulis paparkan dalam "Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari" pada tanggal 18 Desember 2012 di Kampus UII Yogyakarta. Segitiga besi kewirausahaan masih merupakan konsep mentah, yang sangat terbuka lebar terhadap berbagai kritik dan penyempurnaan. Kelemahan institusi bernama birokrasi (pemerintahan) di Indonesia adalah ketidakkonsistensian dalam membangun konsep pembangunan yang berkelanjutan, berjangka panjang. Istilah ganti presiden akan berganti program nasional, ganti menteri otomatis berganti kebijakan nasional; berdampak masif pada pemborosan anggaran negara.

Program-program pembangunan yang sudah dijalankan tidak tuntas, akibat pergantian pucuk pimpinan. Kelemahan institusi perguruan tinggi adalah keangkuhannya terhadap dunia intelektualisme, sehingga menimbulkan jarak psikologis dan intelektual antara dunia realitas sosial dan dunia intelektualitas (idealisme). Istilah para akademisi berada di menara gading (puncak bangunan), sedang masyarakat awam berada di dasar bumi, bahkan ada yang sinis mengatakan sebagai berada di comberan; menjadi sindiran tajam terhadap eksistensi institusi perguruan tinggi. Titik lemah yang dimiliki korporasi adalah mentalitasnya yang cenderung dominan oleh ambisi untuk mengeruk keuntungan (laba) setinggi-tingginya, menjadikan pola pikir institusi bernama korporasi kehilangan rasa humanismenya. Wajar apabila sebagian pihak menstigmatisasi institusi-institusi korporasi sebagai ATM-nya

kaum kapitalis yang sekadar mengejar kekayaan duniawi.

Dengan mengelaborasi dan menyinergisasikan tiga institusi penting di atas yakni perguruan tinggi, birokrasi dan korporasi; diharapkan dapat menghilangkan berbagai kelemahan yang dimiliki, sehingga melahirkan peradaban kolektif yang mampu mencerdaskan, mencerahkan dan mengokohkan kehidupan masyarakat.

Pustaka Acuan

- Biro Pusat Statistik. (2013). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012*. Jakarta
- HB X, Sri Sultan. (2012). *Menggugah Hati, Mengetuk Nurani, Membangun Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan*. Naskah Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Kemanusiaan dari UGM Yogyakarta pada 19 Desember
- Rizky, Awali dan Majidi, Nasyith. (2008). *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E. Publishing Company
- Supadiyanto. (2012a). *Apa Kabar Mahasiswa Pengusaha*. SKH Kedaulatan Rakyat Rubrik Pendidikan, 19 Mei 2012
- Supadiyanto. (2012b). *ICT, Solusi Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran*. SKH Kedaulatan Rakyat, Rubrik Opini, 28 Juni 2012
- Supadiyanto. (2012). *Mewacanakan Segitiga Besi Kewirausahaan: Reoptimalisasi Peran Perguruan Tinggi, Birokrasi dan Korporasi Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani*, Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, UII Yogyakarta, 18 Desember
- Supadiyanto. (2012). *Quovadis Online Journalism: Predicting the Future of Print Media and Online Media*. Proceeding dan Makalah Jogja International Conference on Communication, UPN Veteran Yogyakarta, November 21-22
- Supadiyanto. (2012). *Reoptimalisasi ICT untuk Mencetak 4,76 Juta Pengusaha: Taktik Jitu Menjawab Tantangan Global*. Makalah dan Proceeding of International Seminar and National Symposium, Hyat Hotel Regency Yogyakarta, Juni 23

Supadiyanto. (2012). *Sinkronisasi Pembangunan Pro Lingkungan Hidup, Pro Kearifan Lokal dan Pro Ketahanan Pangan*. Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pascasarjana Undip Semarang. 11 September

Suwitri, Sri. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Modul Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang

Suyatna, Hempri. (2010). *Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area (ACFTA)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.